

---

## *Historical Perspective* dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dwi Urip Wardoyo<sup>1</sup>, Tommy Satrio Wicaksono<sup>2</sup>, Teta Difara anugrah putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi S1 Universitas Telkom Bandung Indonesia

Email : [dwiurip@telkomuniversity.ac.id](mailto:dwiurip@telkomuniversity.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 08 Januari 2022

Revised: 16 Januari 2022

Accepted: 17 Januari 2022

**Keywords:** *Historical Perspective, Government Accounting Standards, Financial Reporting*

**Abstract:** *The practice of accounting and financial reporting is very rapid, its development is not only in Indonesia but also in other countries. Before Indonesia's independence, the management of Indonesian state finances referred to the Indische Comptabiliteitswet (ICW) created by the Dutch colonial government. Provisions in the ICW, including provisions related to accountability for government financial management, continued to be used for decades after the declaration of independence of the Indonesian state. The development of government financial accounting and reporting in Indonesia has accelerated since the implementation of state financial reform. Currently, the government sets Government Accounting Standards (SAP).*

---

## **PENDAHULUAN**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari Undang-undang Nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintah menurut beberapa orang, yaitu :

Menurut Indra Bastian adalah “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas lapiran keuangan di Indonesia”.

Menurut Mardiasmo “Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang telah digunakan untuk mengimplementasiakn standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan, tidak hanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negative berupa rendahnya realibitas dan objektif informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Sedangkan menurut Halim “bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambiln keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang

---

berkepentingan atas berbagai alternatif arah Tindakan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak legislative, yudikatif, dan masyarakat lingkungan”.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 pasal 1 nomor 3 adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan ukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan pasal 184 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pemaparan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (principal) untuk memberikan tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambil keputusan (Meckling 2000). Hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari satu individu menjadi dua individu. Salah satu individu sebagai agen untuk yang lain disebut principal. Agen merupakan pembuat sebuah kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal. Sedangkan principal merupakan pembuat kontrak untuk memberikan imbalan bagi para agen (Hedriksen dan Breda 2002).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus Sesuai Dengan peraturan pemerintah yang berlaku, kini peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang merupakan pengganti dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Sampai dengan tahun 2013 masih menggunakan standar akuntansi tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan pemerintahan dengan tujuan publikasi umum untuk membandingkan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Zeyn 2011).

Laporan keuangan secara umum digunakan terutama untuk membandingkan realisasi pendapatan, transfer, dan pembiayaan anggaran yang telah ditetapkan. Secara umum kegunaan laporan keuangan secara publik adalah. Kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan prospektif, perencanaan dan pelaporan otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, sumber fakta dan gambaran (Mardiasmo 2004).

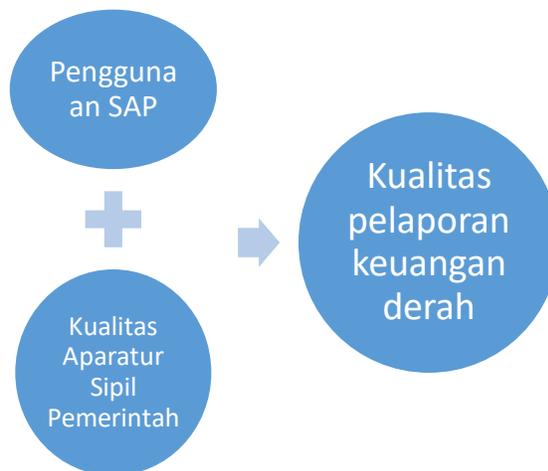
### **Kerangka Pemikiran**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa pelaporan keuangan daerah

---

sesuai dengan standar yang berlaku. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan yang disusun memiliki kualitas yang baik dan sangat berguna sebagai informasi keuangan bagi pembacanya. Informasi yang berguna menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan menggunakan standar pelaporan yang baik.

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkualitas juga mempengaruhi kinerja pemerintah. PNSD yang profesional mengerjakan fungsi dan tugasnya dengan mudah dan cepat. Dengan kompetensi yang dimilikinya, akan memenuhi standar dan target kinerja yang sesuai dengan harapan.



**Gambar 1. Kerangka pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Dalam rangka meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan maka data dikumpulkan dengan cara melakukan survey yang disebarakan kepada beberapa koresponden. Populasinya adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah pegawai negeri sipil daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tual. Dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan yang digunakan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) Kota Tual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota Tual. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka ada kejelasan dan ketegasan standar yang bisa dipakai pemerintah kota Tual. Dan tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan SAP. Implementasi SAP menjadi suatu keharusan agar laporan keuangan pemerintah kota Tual bisa berkualitas artinya memenuhi kualifikasi informasi yang *useful*.

Hasil pengujian juga membuktikan bahwa kualitas Aparatur Pemerintah daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai Negeri sipil Daerah (PNSD) yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik dibutuhkan pemerintah kota untuk menyusun laporan keuangan dengan baik. Laporan Keuangan Pemerintah kota tual belum mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Hal ini berarti pegawai negeri sipil belum memiliki kompetensi dibidang akuntansi sehingga belum mendapatkan kriteria WTP. PNSD perlu meningkatkan kualitas dan komepetensinya agar bisa mendapat kriteria tersebut. Aparatur pemerintah kota perlu mengikuti bimbingan pelatihan, diklat, dan *workshop* agar secara rutin dan tekun. Hal ini diharapkan pemerintah kota mendapatkan pemahaman dan penegtahuan yang lebih baik lagi mengenai praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas akhirnya kami dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa:

- a. Penerapan standar akuntansi pemerintahan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- b. Kualitas aparatur pemerintah daerah juga sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- c. Tidak ada hubungan moderasi antara penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas aparatur sipil pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Hedriksen, and Van Breda. 2002. "Accounting Theory."
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. II. edited by Andi. Yogyakarta.
- Meckling. 2000. "Agency Theory." 15.
- Zeyn, Elvira. 2011. "Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):21. doi: 10.22219/jrak.v1i1.497.
- Purwanti, Lilik. 2018. "Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Membawa Berkah?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (165):173–91. doi: 10.18202/jamal.2018.04.9011.
- Kurrohman, Taufik, and Agus Freddy Maradonna. 2015. "Akuntansi, Kekuatan, Pengetahuan: Peran Akuntansi Dalam Membangun Peradaban." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10(1):41. doi: 10.19184/jauj.v10i1.1244.
-